KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KINERJA BPPP AMBON

TRIWULAN III TAHUN 2026









Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BPPSDM
KELAUTAN DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2026 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja Triwulan III Tahun 2026 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Tahun 2026. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra BPPSDM KP Tahun 2025-2029 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama Triwulan III Tahun 2026, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan dua dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Perjanjian kinerja dengan Pusat Pelatihan KP mencakup 2 sasaran kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP terdiri atas 1 sasaran kegiatan dengan 6 IKU. Laporan kinerja ini memuat uraian mengenai target dan realisasi kinerja Triwuan III Tahun 2026, keberhasilan maupun kendala program,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

permasalahan yang dihadapi beserta solusi yang ditempuh, serta capaian kinerja lainnya yang telah diraih oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi pada Triwulan III Tahun 2026 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, koordinasi pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Ambon, 20 Oktober 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon

Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar, S.St.Pi, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Abubakar S.St.Pi, M.Si

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekertaris :

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Anggota:

Rizky Irawan Attamimi, S.Kom

Dessy Rompis S.AP

Kadri Lestaluhu, S.Pi.,M.A.P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

TIM PENYUSUN ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

IKTISAR EKSEKUTIF ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan 2

1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon 2

1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon 4

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA **10**

2.1 Rencana Strategis 16

2.2 Rencana Kerja Tahun 2026 16

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026 17

2.4 Pengukuran Kinerja 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **21**

3.1 Prestasi Kinerja 21

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja 21

3.3 Akuntabilitas Keuangan 66

3.4 Efisiensi Anggaran 68

BAB IV PENUTUP **70**

4.1 Capaian Kinerja Utama 70

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi 72

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKTISAR EKSEKUTIF

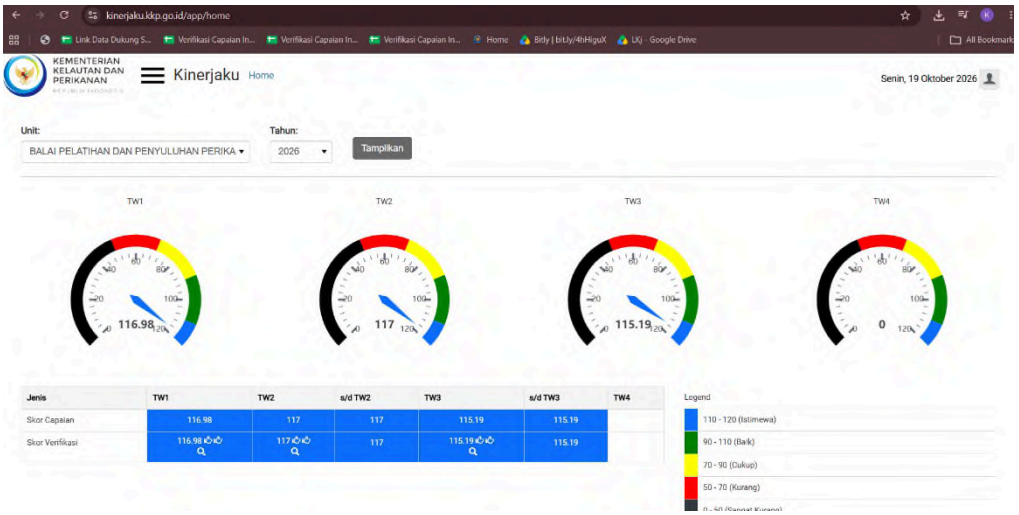
Sasaran kinerja yang dicapai pada Triwulan III Tahun 2026 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Berdasarkan perjanjian kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang terdiri dari 2 sasaran kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP yang terdiri dari 1 sasaran kegiatan dan 6 Indikator Utama (IKU). Dari Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dua dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2026.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Triwulan III Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key perfomance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon menurut Dashboard Kinerja BPPP Ambon Tahun 2026 sebesar **115.19%** yang diperoleh dari Selama Triwulan III Tahun 2026, dari 25 IKU yang menjadi target Tahun 2026 BPPP Ambon, telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Capaian Kinerja BPPP Ambon Triwulan III Tahun 2026

Selama Triwulan III tahun 2026, dari 16 IKU yang menjadi target Triwulan III tahun 2026 BPPP Ambon, telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2026	TARGET TW III	REALISASI TW III	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	836	80	97	120,00
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75			
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	1.600	220	267	120,00
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)	1			
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal)	1	1	2	120,00
		6	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,95	0,45	0,52	115,56
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1		-	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2026	TARGET TW III	REALISASI TW II1	% REALISASI
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)	1	-	-	
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	70	74,07	105,81
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	83			
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	81	81	83,65	103,27
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	86	86	100	116,28
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	77	77	100	120,00
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)	71	71	88,50	120,00
		15	Jumlah usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) satker BPPP Ambon (Nilai)	1	1	2	120,00
		16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup satker BPPP Ambon (Nilai)				
		17	Nilai Indeks Pelayanan Publik Lingkup Satker BPPP Ambon (Nilai)	3,5			
		18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	92			
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71,5			
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	20	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	100	80	97	120,00
		21	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	3,344	2200	2220	100,91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET 2026	TARGET TW III	REALISASI TW III	% REALISASI
		22	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	317	208	250	120,00
		23	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)	32	22	23	104,55
		24	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket)	1	1	2	120,00
		25	Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang)	2	1	1	100,00

Sumber tabel : Aplikasi Kinerjaku KKP

Secara umum kinerja BPPP Ambon untuk Triwulan III istimewa, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Perpres No. 109 Tahun 2024, merupakan dokumen pembangunan tahunan yang menjadi langkah awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Dengan tema *"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"*, RKP 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, kesejahteraan nelayan, serta menurunkan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Dalam mendukung sasaran tersebut, ditetapkan 8 Prioritas Nasional, antara lain penguatan ideologi Pancasila, kemandirian bangsa melalui swasembada dan ekonomi hijau/biru, pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja, penguatan SDM, hilirisasi SDA, pembangunan dari desa, reformasi politik dan birokrasi, serta harmonisasi sosial dan lingkungan.

Perkembangan teknologi di era Industri 4.0 dan *Society* 5.0 menuntut perubahan pola pembangunan yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada perubahan perilaku pelaku utama serta peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, penyuluhan perikanan memiliki peran strategis sebagai sarana transfer pengetahuan dan teknologi.

Sebagai instansi pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program berbasis kinerja, pengelolaan anggaran, serta pencapaian target sesuai visi dan misi organisasi.

Dengan demikian, Laporan Kinerja BPPP Ambon Triwulan III Tahun 2026 tidak hanya menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga bagian dari implementasi kebijakan strategis KKP terbaru dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.2 Tujuan

Penyusunan Penyusunan laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Triwulan III Tahun 2026 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dan memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon selama Triwulan III Tahun 2026.
b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Ambon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Umum dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Kelompok jabatan fungsional dengan tugasnya memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan funsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Struktur Organisasi di BPPP Ambon dapat dilihat pada Gambar:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon

Jumlah keseluruhan pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon hingga 20 Oktober 2026 tercatat sebanyak 380 orang. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas PNS Balai 38 orang, PPPK balai 2 orang, penyuluh PNS 227 orang, PPPK Penyuluh 74 orang, PPPK Paruh Waktu 20 orang, PJLP 13 orang. Dengan komposisi tersebut, mayoritas pegawai BPPP Ambon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai lebih dari 70% dari total pegawai. Sementara itu, keberadaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu menunjukkan adanya dukungan tenaga profesional non-PNS untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi balai. Keragaan SDM BPPP BPPP Ambon disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPP Ambon

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	**Kepala Balai / Eselon III**	1 Orang
2	**Subbag Umum / Eselon IV**	1 Orang
	Jabatan Fungsional Umum	23 Orang
	Tenaga Kontrak (PJLP)	13 Orang
3	Jabatan Fungsional Tertentu	
	- Widyaiswara	2 Orang
	- Instruktur	10 Orang
	- Penyuluh	227 Orang
4	Jabatan Fungsional Lainnya	
	- Analis SDM Aparatur	1 Orang
	- Pranata Keuangan APBN	2 Orang
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja JFU	7 Orang
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja JFT	73 Orang
5	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	20 Orang
	Jumlah Total	**380 Orang**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PNS dan PPPK BPPP Ambon berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	162	105	**266**
2	PPPK/PPPK Paruh Waktu	54	48	**102**
3	PJLP	10	2	**13**

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan II BPPP Ambon Tahun 2026:

a) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b) PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KKP

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

a) Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;
b) Bab I – Pendahuluan, Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
c) Bab II – Perencanaan Kinerja, Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja Tahun Triwulan III 2026
d) Bab III – Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi, Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Realisasi Anggaran Menguraikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

e) Bab IV – Penutup, Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
f) Lampiran, Perjanjian kinerja, Lampiran yang dianggap perlu.

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia. Wilayah kerja BPPP Ambon yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2. Wilayah Kerja BPPP Ambon



BPPP Ambon juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 8 (delapan) Provinsi meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. BPPP Ambon bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.



Gambar 3. Wilayah Satminkal Penyuluhan BPPP Ambon

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Ambon dalam mencapai tujuan organisasi :

1) BPPP Ambon berada pada posisi yang sangat strategis di Kota Ambon, tepatnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

di Jl. Dr. J. Leimena, Rumahtiga, Kecamatan Teluk Ambon. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon, sebelah Utara berbatasan dengan Universitas Pattimura, sebalah barat dicapai dengan jalur darat melalui Wayame dan Rumah Tiga, Sebelah Timur dicapai dengan penyebrangan jembatan merah putih.

2) Memiliki workshop yang lengkap untuk setiap bidang pelatihan;
3) BPPP Ambon memiliki instalasi budidaya yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air, lobster, hasil laut lainnya;
4) Memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya (2 orang widyaiswara, 9 orang instruktur, 228 orang penyuluh perikanan, 1 orang Analis SDM Aparatur, 2 Orang Pranata Keuangan APBN dan 7 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja JFU serta 75 orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja JFT);
5) Sebagian besar SDM BPPP Ambon memiliki usia muda yang produktif;
6) BPPP Ambon tersertifkasi ISO 9001:2015;
7) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu ;
8) Memiliki akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat Basic Safety Training (BST);
9) Memiliki akreditasi program pelatihan budidaya ikan hias nemo dan pembesaran ikan kerapu pada KJA dari Lembaga Akreditasi (LA) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
10) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
11) BPPP Ambon sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 1 sehingga dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri;
12) SDM Asesor BPPP Ambon sebanyak 14 orang sehingga akan mampu melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak;
13) BPPP Ambon mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu;
14) BPPP Ambon mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang layak dipasarkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Ambon memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

1) Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :

   Ketersediaan tenaga pelatih (Instruktur dan Widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa orang sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;

   - Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
   - Kegiatan pelatihan yang dilakukan beberapa tahun terakhir, berdasarkan program prioritas KKP namun pada kenyataan dilapangan terdapat beberapa lokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;

2) Aspek penyelenggaraan penyuluhan KP:

   - Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum merata disetiap kabupaten/kota;
   - Sarana dan prasarana penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong- royong. Strategi pengembangan SDM dijalankan melalui program penyuluhan, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan standardisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPPSDM KP 2025–2029.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berkontribusi pada visi tersebut melaluipelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsiBPPP yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

a. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", serta Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang 10 Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Menuju Indonesia Emas 2045".

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifik, yaitu "Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan". Visi tersebut menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan. SDM yang inovatif akan mendorong lahirnya kreativitas serta adaptasi terhadap dinamika perubahan. SDM yang dimaksud adalah SDM pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing serta SDM calon tenaga kerja yang kompeten yang akan memastikan relevansi keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). SDM yang berdaya saing memperkokoh posisi Indonesia dalam arena global yang sarat kompetisi.

b. Misi

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDM melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan" yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BPPSDM dan Puslatluh KP yang ingin dicapai selama Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2) Mewujudkan peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3) Mewujudkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing;
4) Menghasilkan dan mengembangkan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan;
5) Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dilingkup BPPSDM

d. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun ke dalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yakni :

1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

BPPP Ambon memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 25 (Dua Puluh Lima) Indikator Kinerja Utama program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai Tahun 2026 yang juga mendukung program kinerja Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan Kelautan Perikanan. Adapun penjabaran program kerja BPPP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ambon dibagi menjadi 2 dalam mendukung program kinerja Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP yaitu :

Dukungan Program Kerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Sasaran Kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah "Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan", dengan Indikator Kinerja :

1. Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang) dengan target Tahun 2025 sebanyak 543 orang, Tahun 2026 sebanyak 836 orang, Tahun 2027 sebanyak 2,007 orang, Tahun 2028 sebanyak 2,084 orang dan Tahun 2029 sebanyak 2,222 orang
2. Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%), untuk 5 Tahun dari 2025-2029 dengan target 75%
3. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Ambon (orang) dengan target Tahun 2025 sebanyak 715 orang, Tahun 2026 sebanyak 1600 orang, Tahun 2027 sebanyak 2,677 orang, Tahun 2028 sebanyak 2,778 orang dan Tahun 2029 sebanyak 2,962 orang
4. Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen), dengan target tahun 2026 1 dokumen
5. Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal), dengan target tahun 2026 1 proposal
6. Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Milyar) dengan target Tahun 2025 sebesar 0,73 rupiah miliar Tahun 2026 sebesar 0,95 rupiah rupiah miliar dan Tahun 2027-2029 sebesar 0,81 sebesar rupiah miliar.
7. Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit), untuk target 2026 1 unit
8. Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen) target 2026 1 dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dukungan Program Kerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Sasaran Kegiatan Kedua (SK-2) Tata Kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan

Sasaran yang akan dicapai adalah Sasaran Kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah Tata Kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

9. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%) dari Tahun 2025 – 2029 target sebesar 100 %
10. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks) dari Tahun 2025=2029 targetnya sebesar 83
11. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai) target Tahun 2025 sebesar 81, 2026 sebesar 81.5, 2027 sebesar 82, Tahun 2028 sebesar 82,5, Tahun 2029 sebesar 82,5
12. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%) target tahun 2025 sebesar 85, 2026 sebesar 86, 2027 sebesar 87, Tahun 2028 sebesar 88, Tahun 2029 sebesar 89
13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%) Tahun 2005 dan 2026 targetnya sebesar 80, Tahun 2027 sebesar 82, tahun 2028 83 dan Tahun 2029 targetnya sebesar 84
14. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai) Tahun 2026 – 2029 targetnya 71
15. Jumlah usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) satker BPPP Ambon (Nilai), untuk target Tahun 2026 1 proposal
16. Nilai keterbukaan Informasi Publik Lingkup Satker BPPP Ambon (Nilai), untuk target Tahun 2026 sebesar 85
17. Nilai Indeks Pelayanan Publlik Lingkup Satker BPPP Ambon (Nilai), untuk target Tahun 2026 sebesar 3,5
18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai) Tahun 2026 – 2029 targetnya 92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai) Tahun 2026 – 2029 targetnya 71,5

Dukungan Program Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategi Ke-tiga (SK-3) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Penyuluhan dan Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja berikut:

20. Jumlah Kelompok Pelaku utama/Pelaku pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Ambon dengan target Tahun 2025 sebesar 24 kelompok Tahun 2026 sebesar 100 kelompok, Tahun 2027 sebesar 110 kelompok, Tahun 2028 sebesar 122 kelompok, dan Tahun 2029 sebesar 132 kelompok
21. Jumlah Kelompok Pelaku utama/Pelaku pendukung yang disuluh oleh BPPP Ambon dengan target Tahun 2025 sebesar 2.600 kelompok, Tahun 2026 sebesar 3.344 kelompok, Tahun 2027 sebesar 3.694 kelompok, Tahun 2028 sebesar 4.003 kelompok, dan Tahun 2029 sebesar 4.420 kelompok
22. Jumlah Kelompok Pelaku utama/Pelaku pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Ambon dengan target Tahun 2025 sebesar 111 kelompok Tahun 2026 sebesar 317 kelompok, Tahun 2027 sebesar 279 kelompok, Tahun 2028 sebesar 279 kelompok, dan Tahun 2029 sebesar 272 kelompok
23. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit) Tahun 2025 sebesar 20 unit, Tahun 2026 – 2029 sebesar 32 unit
24. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket) Tahun 2026 – 209 sebesar 1 paket
25. Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang), Tahun 2006 sebanyak 2 orang, Tahun 2027 sebanyak 12 orang, Tahun 2027 sebanyak 16 orang dan tahun 2029 sebanyak 20 orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2 Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Strategis, maka BPPP Ambon didukung dengan pagu anggaraan awal sebesar Rp. 66.055.168.000-, Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan.

Tabel 2. Rencana Kerja Tahun 2026

KODE	URAIAN	PAGU	NILAI BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
32.12	PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	66,055,168,000	596,740,000	65,458,428,000	48,173,989,339	72.93	17,881,178,661
032.12.DL	*Program Pendidikan dan Pelatihan Vakasi*	13,144,408,000	596,740,000	12,547,668,000	9,339,006,519	197	3,805,401,481
2375.RAL.711	Peralatan dan Mesin Pelatihan KP	11,000,000,000	596,740,000	10,403,260,000	7,919,945,290	72.00	3,080,054,710
2375.SCC.831	Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang dilatih	770,267,000		770,267,000	374,230,394	48.58	396,036,606
7020.QDD.646	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dan penyuluhan KP	1,374,141,000		1,374,141,000	1,044,830,835	76.04	329,310,165
032.12.WA	*Program Dukungan Manajemen*	52,910,760,000		52,910,760,000	38,834,982,820	73.40	14,075,777,180
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	52,910,760,000			38,834,982,820	73.40	14,075,777,180
2378.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	52,904,296,000			38,831,033,820	73.40	14,073,262,180
2378.EBA.962	Layanan Umum	13,218,000		13,218,000	10,481,615	-	2,736,385
2378.EBA.994	**Layanan perkantoran**	**52,891,078,000**		**52,891,078,000**	**38,820,552,205**	**73.40**	**14,070,525,795**
001	Gaji dan Tunjangan	50,483,170,000		50,483,170,000	36,995,949,830	73.28	13,487,220,170
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,407,908,000		2,407,908,000	1,824,602,375	75.78	583,305,625
2378.EBD	Layanan manajemen Kinerja Internal	6,464,000		6,464,000	3,949,000	61.09	2,515,000
2378.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk satker vertikal	2,040,000			361,000	17.70	1,679,000
2378.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan untuk satker vertikal	4,424,000			3,588,000	81.10	836,000

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PANRB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga BPPP Ambon memiliki dua perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja dengan Pusat Pelatihan dan Pusat Penyuluhan. Adapun Perjanjian Kinerja BPPP Ambon pada Tahun 2026 sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3. Penggabungan Perjanjian Kinerja antara Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2026

No.	SASARAN STRATEGIS	No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK AWAL 2026	TARGET PK REVISI 2026
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	608	836
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75	75
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	800	1.600
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)	1	1
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal)	1	1
		6	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,22	0,95
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	1
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)	1	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	83	83
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	81	81
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	86	86
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	77	77
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)	71	71
		15	Jumlah usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) satker BPPP Ambon (Nilai)	-	92
		16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup satker BPPP Ambon (Nilai)	-	85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	SASARAN STRATEGIS	No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET PK AWAL 2026	TARGET PK REVISI 2026
		17	Nilai Indeks Pelayanan Publik Lingkup Satker BPPP Ambon (Nilai)	-	3,5
		18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	92	92
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71,5	71,5
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	20	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	100	100
		21	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	3,344	3344
		22	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	317	317
		23	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)	32	32
		24	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket)	1	1
		25	Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang)	2	2

Sumber tabel : Aplikasi Kinerjaku KKP

Keterangan :

	IKU dengan Pusat Pelatihan KP
	IKU dengan Pusat Penyuluhan KP

Perjanjian Kinerja (PK) BPPP Ambon mengalami revisi I berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Pelatihan Nomor 660/BPPSDM.4/RC.610/XII/2025 tanggal 1 April 2026 tentang Penyampaian Perubahan Kinerja Tahun 2026 Lingkup Pusat Pelatihan KP. Dokumen Perencanaan Kinerja Level 3 mengalami perubahan sebagai berikut:

1. IKU pada Perjanjian Kinerja (PK) awal berjumlah 16 IKU berubah menjadi 19 IKU
2. Perubahan IKU Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang) semula

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

608 menjadi 836 orang

3. Perubahan IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang) semula 800 orang menjadi 1600 orang
4. Perubahan IKU Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (rupiah miliar) semula 0.22 rupiah miliar menjadi 0.95 rupiah miliar.
5. Penambahan IKU Jumlah usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) satker BPPP Ambon (Nilai) 1 proposal
6. Penambahan IKU Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup satker BPPP Ambon (Nilai) 85
7. Penambahan IKU Nilai Indeks Pelayanan Publik Lingkup Satker BPPP Ambon (Nilai) 3,5
8. Perubahan anggaran total dari semula Rp. 68.646.711.000,- menjadi 66.055.168.000,-

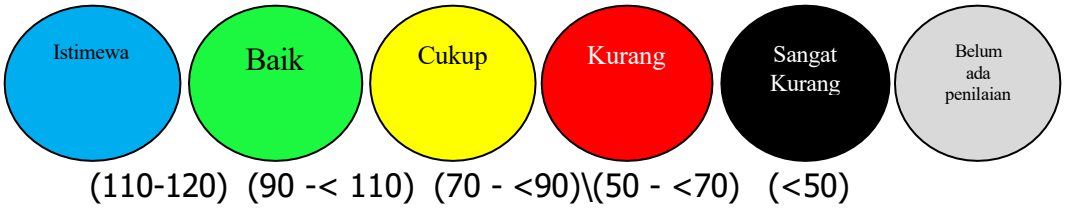
2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.01 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja Triwulan III BPPP Ambon Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

a. Angka maksimum adalah 120;
b. Angka minimum adalah 0;
c. Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.

Adapun status indeks capaian IKU seperti gambar sebagai berikut :



Gambar 4. Status indeks capaian IKU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *logical framework*.

2.4.02 Metode Pengukuran Kinerja

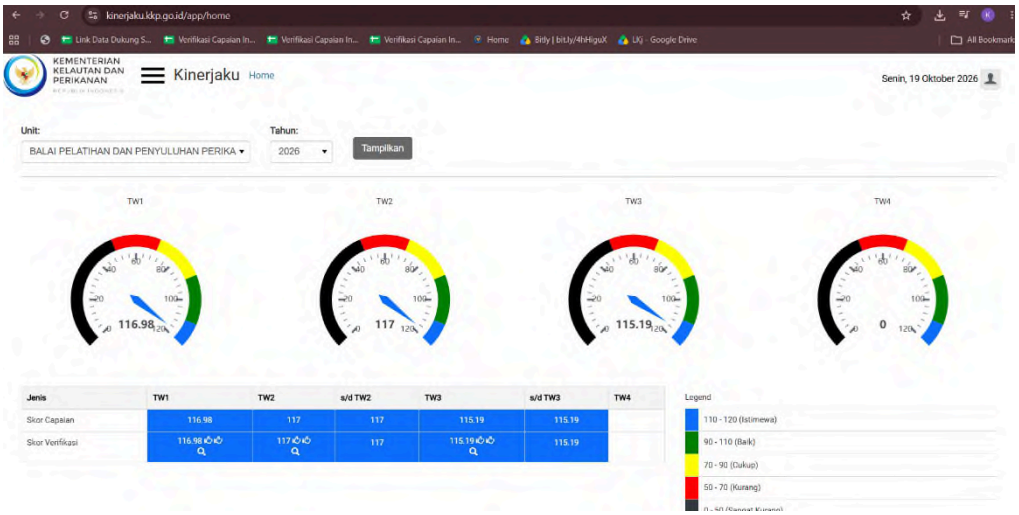
Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Ambon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPPP Ambon Nomor B. 1879/BPPP.AMB/OT.710/X/2026 tentang Tim Penyusunan laporan Kinerja BPPP Ambon Tahun 2026. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua bagian lingkup BPPP Ambon. Berdasarkan laporan bagian penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Triwulan III 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*Key Perfomance Indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon Tahun 2026 sebesar 115,19%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku Level 4 BPPP Ambon

Selama Triwulan III Tahun 2026, dari 25 IKU yang menjadi target Tahun 2026 BPPP Ambon, telah terealisasi 16 IKU sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran kegiatan dan tujuan kegiatan dapat tercapai. BPPP Ambon pada tahun 2026 khususnya Triwulan III memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Capaian IKU BPPP Ambon Triwulan III 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	80	97	120
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)			
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	220	267	120
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)			
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal)	1	2	120
		6	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0.45	0.52	115.56
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)			
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)			
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	70	74.07	105,87
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)			
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	81	83.65	103,27
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	86	100	116.28
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	77	100	120

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)	71	88,50	120
		15	Jumlah usulan proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) Satker BPPP Ambon (Nilai)	1	2	120
		16	Nilai keterbukaan Informasi Publik BPPP ambon (Nilai)			
		17	Nilai Indeks Pelayanan Publik lingkup satker BBB ambon (Nilai)			
		18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	20	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	80	97	120
		21	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	2200	2220	100,91
		22	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	208	250	120
		23	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)	22	23	104,55
		24	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket)	1	2	120
		25	Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang)	1	1	100

Sumber tabel : Aplikasi Kinerjaku KKP

Salah satu visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Restra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Ambon sebagai bagian dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.01.01 Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)**

IKU ini merupakan merupakan indikator adalah indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana lulusan pelatihan KP yang diselenggarakan secara luring mampu mendapatkan pekerjaan, mengembangkan usahanya dan atau terlibat dalam kegiatan produktif di dunia usaha, industri dunia kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berlayar/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB) berisi informasi KBLI /surat keterangan bekerja dari Perusahaan atau instansi terkait(mis: dinas kp, kelurahan, organisasi resmi berbadan hukum)/surat keterangan bekerja dari kepala Balai Pelatihan/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/Suket dari Penyalur tenaga Kerja/ S KTP dengan jenis pekerjaan bidang KP (mis: Nelayan) /Surat Keterangan Kecakapan (SKK).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5. Capaian Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap (DUDIKA) (orang)

IKSK.01.01 Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	40	80	97.00	120,00	142.50	2,222	4.37

Capaian IKU 1 pada Triwulan III 2026 dengan target sebesar 80 orang realisasi mencapai 97 orang (120%). Realisasi ini meningkat sebesar 142.50 % dibandingkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 4,37% terhadap target Renstra 2029.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan realisasi lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap (DUDIKA) BPPP Lingkup BPPSDM

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	400	517	120
2	BPPP Tegal	5639	6200	120
3	BPPP Medan	91	91	100
4	BPPP Ambon	80	97	120
5	BPPP Bitung	46	56	120

Jika melihat nilai capaian dari satker lain pada tabel di atas, BPPP Ambon Berada pada posisi nomor 4 antara 5 Satker yang sudah melakukan kegiatan yang terserap di usaha dan dunia industri dengan menjangkau kelompok binaan penyuluh perikanan satmikal BPPP Ambon.

Faktor penunjang untuk keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah:

a) Terdapat Manual IKU untuk Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kompeten yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja
b) Surat Keterangan Berlayar/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Nomor Induk Berusaha (NIB) berisi informasi KBLI /surat keterangan bekerja dari Perusahaan atau instansi terkait(mis: Dinas KP, kelurahan, organisasi resmi berbadan hukum)/surat keterangan bekerja dari kepala Balai Pelatihan/kartu pegawai/Kartu KUSUKA/perjanjian kerja/SK Kelompok/Suket dari Penyalur tenaga Kerja/S KTP dengan jenis pekerjaan bidang KP (mis: Nelayan)/Surat Keterangan Kecakapan (SKK) Kurikulum pelatihan telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan sehingga relevan dengan kebutuhan di dunia usaha/dunia industri saat ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c) Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

a) Efisiensi biaya perjalanan sehingga membutuhkan peran penyuluh Penyuluh Perikanan dalam merekrutmen kelompok-kelompok binaan yang memiiki persayaratan yang benar dan valid.
b) Kemudahan bagian pelatihan dalam merekap hasil dikarenakan hasil yang diperoleh sesuai dengan mamual IKU sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja masyarakat yang dilatuh pada Dunia Usaha dan Dunia Industri tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Optimalisasi peran penyuluh perikanan dalam berperan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan SDM Manusia Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pelatihan;
2. Melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan manual IKU sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaran pelatihan berikutnya.
3. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh perikanan dalam mengidentifikasi dan melakukan pengisian instrumen seperti biodata pelatihan dan pendampingan penerapan hasil pelatihan.

- **IKSK.01.02 Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)**

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana peserta pelatihan masyarakat KP yang diselenggarakan pada semester I dan II tahun 2026 tahun 2026 berjalan dengan metode pembelajaran secara luring, mampu mengimplementasikan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dalam aktivitas nyata, baik dalam bentuk peningkatan produktivitas usaha, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, maupun penguatan kapasitas kerja di sektor kelautan dan perikanan. Data dukung indikator ini berupa dokumen Evaluasi Pasca Pelatihan yang disusun oleh penyelenggara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pelatihan masyarakat KP berdasarkan metode sampling menggunakan rumus Slovin dengan margin of error sebesar 5% terhadap total peserta pelatihan yang memenuhi kriteria Evaluasi Pasca Pelatihan :

a. Jumlah lulusan Pelatihan Masyarakat KP dengan metode pembelajaran luring yang dihitung dengan rumus Slovin, dan digunakan sebagai sampel Evaluasi Pasca Pelatihan.
b. Jumlah lulusan pelatihan KP yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan berdasarkan data hasil Evaluasi Pasca Pelatihan.
c. Persentase lulusan pelatihan KP yang menerapkan kompetasi hasil pelatihan.

Hingga akhir Triwulan III 2026, capaian indikator ini belum terisi (nol) karena evaluasi IKU akan dilakukan nanti diakhir tahun.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah:

a). Terdapat Manual IKU untuk Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)
b). Terdapatnya instrument evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan sekurang kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih
c). Terdapat SOP kegiatan evaluasi pasca pelatihan sebagai SOP utama BPPP Ambon.
d) Kurikulum pelatihan telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan sehingga relevan dengan kebutuhan di dunia usaha/dunia industri saat ini.
e) Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

a) Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan secara langsung dengan mengoptimalkan peran penyuluh dilapangan.
b) Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- **IKSK.01.03 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang)**

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka). Pelatihan ini menggunakan anggaran APBN dalam DIPA BPPP Ambon TA 2026 pada RO 2375.SCC.831 yaitu Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih dengan besaran mencapai Rp.770.267.000, dan pada Triwulan III 2026 capaian Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih sejumlah 267 orang dari target 220 orang. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Masyarakat KP yang dilatih dapat dilihat pada tabel :

Tabel 7. Capaian Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon

IKSK.01.03 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
1702	1597	2540	255	220	267	120.00	5	2,962	9.01

Capaian IKU Triwulan III 2026 sebesar 267 orang (120% dari target 220 orang). Realisasi ini meningkat 5 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 9.01 % terhadap target Renstra 2029.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Capaian Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Lingkup BPPSDM

No.	**Nama Satker**	**Target**	**Realsiasi**	**% Capaian**
1	BPPP Tegal	7210	9618	120
2	BPPP Banyuwangi	690	838	120
3	BPPP Ambon	220	267	120
3	BPPP Medan	200	200	100
5	BPPP Bitung	46	56	120

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, BPPP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ambon berada pada posisi nomor 3 diantara 5 Satker dikarenakan pelaksanaan pelatihan bidang kepelautan dan budidaya secara luring dengan menjangkau kelompok binaan penyuluh perikanan Satminkal BPPP Ambon dan calon ABK yang mengikuti pelatihan.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

a) Adanya Manual IKU tentang masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon.
b) Adanya SOP kegiatan pelatihan yang merupakan SOP utama BPPP Ambon.
c) Pelaksanaan pelatihan juga dilaksanakan secara online sehingga mudah untuk diakses masyarakat, dengan memberikan peluang secara khusus bagi masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk mendaftar dan mengikuti kegiatan tersebut.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya koordinasi persiapan pelatihan menggunakan media Whatshapp.
2. Persiapan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara intensif oleh panitia pelatihan dan penyuluh pendamping sehingga proses kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Setiap bidang pelatihan bekerjasama dengan bagian penyelenggaraan pelatihan agar masing-masing bidang menyiapkan judul materi full online sesuai arahan kebijakan pimpinan, kebutuhan daerah dan potensi daerah.
2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping rencana kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan baik secara zoom meeting maupun komunikasi secara intensif melalui telepon.
3. Upaya peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) dan meningkatkan serta terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang dimiliki.

- **IKSK.01.04 Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Ambon (Dokumen)**

IKU ini merupakan Indikator kinerja yang mengukur jumlah naskah perangkat pelatihan yang disusun dan diusulkan oleh BPPP Ambon kepada Pusat, untuk dibahas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

lebih lanjut dan ditetapkan sebagai perangkat pelatihan resmi yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan kelautan dan perikanan, dengan ketentuan :

1. Adanya Naskah perangkat pelatihan BPPP Ambon
2. Surat Penyampaian Naskah perangkat pelatihan BPPP Ambon ke Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan.

Hingga akhir Triwulan III tahun 2026, capaian indikator ini belum terisi (nol) karena penilaian IKU dilakukan secara tahunan.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

a). Adanya Manual IKU tentang Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon

b). Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

a). Efisiensi biaya sehingga membutuhkan peran tenaga fungsional atau tenaga teknis lainnya yang memiliki kemampuan untuk dapat menyusun sebuah perangkat pelaksnaan pelatihan.

b). Kemudahan bagian pelatihan dalam merekap hasil dikarenakan hasil yang diperoleh sesuai dengan mamual IKU sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Setiap bidang fungsional (Widyaisara/Instruktur atau penyuluh) diharapkan memikiki konsep perangkat pelatihan yang sesuai dngan Manual IKU yang diharapkan.
2. Upaya peningkatan kompetensi pelatih dan meningkatkan serta terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang dimiliki.

- **IKSK.01.05 Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan Dan Perikanan di BPPP Ambon (Proposal)**

Indikator kinerja yang mengukur jumlah usulan proposal inovasi pelatihan berbasis kaji terap bidang kelautan dan perikanan yang disusun dan diajukan oleh Balai Pelatihan kepada Pusat Pelatihan KP. Proposal ini memuat rancangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pengembangan metode atau teknologi pelatihan yang akan diuji coba di lapangan (kaji terap) untuk memastikan efektivitasnya sebelum dijadikan standar materi pelatihan. Capaian indikator ini dihitung berdasarkan dokumen proposal yang telah dikirimkan untuk kemudian mengikuti tahapan seleksi, pembahasan, dan validasi di tingkat pusat.

Pada Triwulan III 2026, capaian IKU Proposal inovasi pelatihan berbasis kaji terap bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon melampaui target dengan realisasi sebanyak 2 proposal dari target 1 proposal.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (Proposal)

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	1	5	120
2	BPPP Ambon	1	2	120
3	BPPP Bitung	1	2	120
4	BPPP Tegal	1	1	100

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, BPPP Ambon berada pada posisi nomor 2 diantara 4 dari semua Satker.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

a). Adanya Manual IKU tentang Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan Dan Perikanan Bppp Ambon (Proposal)

b). Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari BNSP

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

a). Efisiensi biaya sehingga membutuhkan peran tenaga fungsional atau tenaga teknis lainnya yang memiliki kemampuan untuk dapat menyusun sebuah perangkat pelaksnaan pelatihan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b). Kemudahan bagian pelatihan dalam merekap hasil dikarenakan hasil yang diperoleh sesuai dengan mamual IKU sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Setiap bidang fungsional (Widyaisara/Instruktur atau penyuluh) diharapkan memiliki konsep perangkat pelatihan yang sesuai dngan Manual IKU yang diharapkan.
2. Upaya peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) dan meningkatkan serta terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang dimiliki.

- **IKSK.01.06 Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar).**

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan. Cara perhitungan IKU tersebut dengan menjumlahkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan yang tercatat pada aplikasi OM SPAN BPPP Ambon.

Sampai akhir Triwulan III 2026 BPPP Ambon telah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan nota dinas Plh.Sekertaris BPPSDM KP NOMOR 4020/BPPSDM.1/KU.340/X/2026 tanggal 7 Oktober 2026 tentang Penyampaian Capaian PNBP SATKER Lingkup BPPSDM januari sampai September Tahun 2026 adalah sesebar 0,52 rupiah miliar dari target 0,45 rupiah miliar pada Triwulan III 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 10. Capaian Nilai PNBP Satker BPPP Ambon Triwulan III 2026

IKSK.01.06 Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0.39	0.42	0.82	0.66	0.45	0.52	115.56	-21.21	0.81	64.20

Capaian IKU ini pada Triwulan III 2026 sebesar 0.52 rupiah miliar (115.56% dari target 0.45 rupiah miliar). Realisasi ini masih mengalami penurunan sebesar -21.21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 64,20% terhadap target Renstra 2029.

Kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (Rupiah Miliar)	Realsiasi (Rupiah Miliar)	% Capaian
1	BPPP Tegal	15,08	16,33	108
2	BPPP Banyuwangi	0,50	0,63	120
3	BPPP Ambon	0.45	0.52	114,89
2	BPPP Medan	0.26	0.34	120
5	BPPP Bitung	0.08	0.34	120

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas BPPP Ambon berada pada posisi nomor 3 diantara 5 Satker dikarenakan Komitmen Pimpinan dan Tim Humas dalam melakukan Promosi baik secara langsung maupun pada media sosial BPPP Ambon kegiatan strategis sebagai sumber penghasil PNBP serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

a. Adanya Manual Iku tentang Nilai PNBP Satker BPPP Ambon.
b. Komitmen Pimpinan dan Tim Humas dalam melakukan Promosi baik secara langsung maupun pada media sosial BPPP Ambon kegiatan strategis sebagai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sumber penghasil PNBP serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.

c. Peningkatan pelayanan pelatihan melalui pengembangan aplikasi digital.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Pemanfaatan aset barang milik negara yang dilaksanakan secara optimal.
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan kerjasama pelatihan yang menggunakan sarana dan prasarana BPPP Ambon yang sangat memadai.
2. Meningkatkan optimalisasi aset dan rapat monitoring capaian PNBP secara periodik.

- **IKSK.01.07 SARANA PRASARANA PELATIHAN KP YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA DI BPPP AMBON (UNIT)**

Indikator keberhasilan yang mengukur sejauh mana sarana dan prasarana pelatihan kelautan dan perikanan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan mutu penyelenggaraan pelatihan. Peningkatan kapasitas dimaksud mencakup perbaikan, modernisasi, penambahan fasilitas, serta optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis d an kebutuhan pembelajaran. Pembuktian dilakukan melalui dokumen resmi berupa Data awal rencana Peningkatan kapasitas Sapras Bukti SPK/ Kontrak**.**

Sampai akhir Triwulan III tahun 2026, capaian indikator ini belum terisi (nol) karena penilaian IKU dilakukan secara tahunan.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah :

1. Adanya Manual IKU tentang Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Tersedianya SOP pengadaan dan seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.
3. Adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran dan program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengadaan barang yang sesuai jadwal dan dapat diselesaikan tepat waktu serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan III Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Ambon membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Melaksanakan pengadaan barang yang tersedia pada layanan E-Katalog sehingga memudahkan untuk menyesuaikan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan dilaksanakan oleh LPSE.

- **IKSK.01.08. PENYIAPAN DATA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA PELATIH DI BPPP AMBON (DOKUMEN)**

Indikator ini mengukur jumlah dokumen yang memuat hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(Instruktur/Widyaiswara) pada Balai Pelatihan sebagai dasar perencanaan program pengembangan SDM.

Hingga akhir Triwulan III tahun 2026, capaian indikator ini belum terisi (nol) karena evaluasi IKU dilakukan secara tahunan.

Beberapa faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

a). Adanya Manual IKU tentang data kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pelatih.

b). Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

a). Efisiensi biaya sehingga membutuhkan peran tenaga fungsional atau tenaga teknis lainnya yang memiliki kemampuan untuk dapat menyusun sebuah perangkat pelaksnaan pelatihan.

b). Kemudahan bagian pelatihan dalam merekap hasil dikarenakan hasil yang diperoleh sesuai dengan mamual IKU sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

a). Setiap bidang fungsional (Widyaisara/Instruktur atau penyuluh) diharapkan data kebutuhan dalam pengembangan kompetensi yang sesuai dengan Manual IKU yang diharapkan.

b). Upaya peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) dan meningkatkan serta terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang dimiliki.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.

- **IKSK.02.01 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)**

Merupakan indikator yang menunjukkan Layanan Dukungan Manajemen Internal pada Pusat Pelatihan KP meliputi antara lain layanan keuangan, layanan pengedalian internal, layanan kepegawaian dan layanan pengelolaan BMN.

Pemenuhan layanan dukungan manajemen internal berupa tersedianya laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon. Perhitungan Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon ini dihitung berdasarkan pemenuhan laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon, dan sampai dengan Triwulan III tahun 2026, perhitungan ini dilakukan, sesuai dengan data dukung yang telah dikerjakan, BPPP Ambon sudah memenuhi dokumen pendukung baru mencapai 74,07%

Tabel 12. Capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon

IKSK.02.01 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	75	75.86	81.67	70.00	74.07	105.81	-9.31	100	74

Capaian IKU Triwulan III Tahun 2026 sebesar 74.07 % (105,81% dari target 70%). Realisasi ini menurun -9,31 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 74% terhadap target Renstra 2029.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Satker	Target (%)	Realsiasi (%)	% Capaian
1	BPPP Tegal	70	74,07	105,81
2	BPPP Banyuwangi	70	74,07	105,81
3	BPPP Bitung	70	74,07	105,81
4	BPPP Medan	70	74,07	105,81
5	BPPP Ambon	70	74,07	105,81

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 5 diantara 5 satker lainnya atau semua setara dengan perolehan yang didapatkan dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja manajemen internal dengan output yang ditargetkan per masing-masing pegawai.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon.
2. Dokumen dukungan internal merupakan dokumen yang harus ada dimiliki dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini dengan mengetahui Progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penyusunan laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon tersebut telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan dokumen tersebut dapat dilakukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan III tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Melakukan rapat monev capaian kinerja setiap dan memastikan seluruh dokumen yang telah ditargetkan dapat terpenuhi dengan baik.
2. Kegiatan penyusunan laporan /dokumen dukungan internal.

- **IKSK.02.02 Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan dilakukan perhitungan setiap semester .

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Terdapat pegawai lingkup BPPP Ambon yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;
3. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
4. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan
5. Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.

Peningkatan atau keberhasilan tercapaianya target Nilai IP ASN BPPP Ambon ini antara lain disebabkan oleh komitmen seluruh pegawai di lingkup BPPP Ambon, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat- diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai Media sosial Whatsapp.

- **IKSK.02.03 Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)**

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Penilaian Mandiri SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker .

Hingga Triwulan III Tahun 2026, nilai penilaian mandiri SAKIP BPPP Ambon berhasil mencapai angka 83,65 103,27% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 81.

Tabel 14. Capaian Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon

IKSK.02.03 Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
73.47	74.85	79.74	80.89	81.00	83.65	103.27	3.41	83.00	101

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 83,65 (103,27% dari target 81). Realisasi ini meningkat 3.4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 101 % terhadap target Renstra 2029.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Perbandingan realisasi penilaian mandiri SAKIP BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	**Nama Satker**	**Target (%)**	**Realsiasi (%)**	**% Capaian**
1	BPPP Medan	81	86,40	107
2	BPPP Banyuwangi	81	86,05	106
3	BPPP Bitung	81	85,25	105
4	BPPP Tegal	81	84,40	104
5	BPPP Ambon	81	83,65	103,27

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 5 diantara 5 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja manajemen internal dengan output yang ditargetkan per masing-masing pegawai.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU sebagai berikut :

1. Adanya aplikasi Kinerjaku yang telah memuat menu template penilaian mandiri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SAKIP sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP.

2. Adanya ketersediaan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan selama 5 tahun.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP
2. Aplikasi Kinerjaku yang memuat menu tamplate penilaian mandiri SAKIP
3. Operator yang menangani penilaian mandiri SAKIP dan Kinerjaku masih petugas yang sama sehingga memudahkan pemahaman pemenuhan dokumen penilaian mandiri SAKIP BPPP Ambon.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Dokumen penilaian mandiri SAKIP telah disusun dari awal tahun sebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan.
2. Penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada Google Drive milik BPPP Ambon.
3. Adanya upaya baru dalam perencanaan/pengukuran dan pelaporan kinerja.

- **IKSK.02.04 Presentasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Cara perhitungan IKU ini dengan cara Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 70% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\%\ \text{Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Sudah Ditindaklanjuti Secara Tuntas.}} \times 100\%$$

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang akan dihitung setiap triwulanan dan berdasarkan surat dari Sekertaris BPPSDM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KP Nomor 4091/BPPSDM.1/HP.510/X/2026 tanggal 13 Oktober 2026 tentang Capaian IKU Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP, BPPP Ambon memperoleh nilai sebesar 100% dari target Triwulan III tahun 2026 sebesar 86%.

Tabel 16. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon

IKSK.02.04 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPP Ambon (%)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
70	75	82	85	86	100	116.28	17.65	89	112.36

Capaian IKU ini pada Triwulan III 2026 sebesar 100% (120% dari target 86%). Realisasi ini mengalami kenaikan 17.65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 112,36% terhadap target Renstra 2029.

Realisasi IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Perbandingan realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	**Nama Satker**	**Target (%)**	**Realsiasi (%)**	**% Capaian**
1	BPPP Tegal	86	100	116,28
2	BPPP Ambon	86	100	116.28
3	BPPP Medan	86	92	107
4	BPPP Banyuwangi	86	86	100
5	BPPP Bitung	86	86	100

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi 2 dari semua satker. dikarenakan baiknya pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja melalui aplikasi SIDAK.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Memiliki SOP terkait pengisian aplikasi SIDAK KKP yang merupakan bagian dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.
2. Komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkata kompetensi operator yang menangani aplikasi SIDAK KKP sehingga progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SIDAK KKP sesuai dengan SOP turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Triwulan III Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Jenderal KKP secara tepat waktu dan mengupload hasil tindaklanjut tersebut kedalam aplikasi SIDAK
2. Berkoordinasi Inspektorat Jenderal KKP untuk mengkonfirmasi temuan yang sudah ditindaklanjuti agar dapat segera menuntaskan status temuan menjadi nihil pada aplikasi SIDAK.

- **IKSK.03.05 Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada Sirup BPPP Ambon (%)**

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada tahun 2025, cara perhitungan persentase RUP PBJ yang diumumkan adalah nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP dibagi pagu pengadaan barang/jasa dikalikan 100%.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari Biro Umum PBJ yang akan dihitung setiap triwulanan dan berdasarkan surat dari Sekertariat Jenderal KKP NOMOR 1059/SJ.7/PL.410/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026 tentang penyampaian hasil perhitungan capaian indikator kinerja presentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan III 2026 BPPP Ambon memperoleh nilai sebesar 100% dari target sebesar 77%.

Tabel 18. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)

IKSK. 02.05 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Ambon (%)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	100	77	100	120	00	84	119

Capaian IKU ini pada Triwulan III 2026 sebesar 100% (120% dari target 77%). Realisasi ini mengalami kesamaan capaiandengan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 119% terhadap target Renstra 2029.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Perbandingan realisasi Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No	Nama Satker	Target (%)	Realsiasi (%)	% Capaian
1	BPPP Tegal	77	100,00	120,00
2	BPPP Banyuwangi	77	100,00	120,00
3	BPPP Bitung	77	100,00	120,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4	BPPP Ambon	77	100,00	120,00
5	BPPP Medan	77	100,00	120,00

Jika melihat tabel diatas, kinerja seluruh satuan kerja di lingkup BPPSDMKP menunjukkan hasil yang sangat signifikan dan seragam pada indikator pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem SIRUP.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Memiliki SOP terkait pengisian aplikasi SIRUP KKP yang merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan.
2. Komitmen penanggung jawab kegiatan untuk mengumumkan seluruh RUP PBJ pada aplikasi SIRUP.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkatan kompetensi operator yang menangani aplikasi SIRUP KKP sehingga progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2026, BPPP Ambon melakukan koordinasi dengan Biro UMUM PBJ KKP terkait progres rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- **IKSK.02.06 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)**

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II

IKU ini merupakan IKU baru ditahun 2026, dengan Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) yang terdiri dari penciptaan arsip (25%), penggunaan arsip (25%), pemeliharaan arsip (25%) penyusutan arsip (25%) dan Sumber daya kearsipan (bobot 50%) yang terdiri dari sumber daya manusia kearsipan (50%), serta prasarana dan sarana (50%).

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/SJ Tahun 2026 dengan tim dan anggota yang melakukan verifikasi terhadap Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan NOMOR B.2996/SJ.6/TU.220/IX/2026, tanggal 2 September 2026 hasil penilian IKU mencapai 88,50 sebesar 120% dari target nilai 71.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Perbandingan realisasi Pengawasan Kearsipan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (%)	Realsiasi (%)	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	71	100,00	120,00
2	BPPP Tegal	71	99,40	120,00
3	BPPP Bitung	71	88,88	120,00
4	BPPP Ambon	71	88,50	120,00
5	BPPP Medan	71	84,94	118

Jika melihat tabel diatas, maka kinerja BPPP Ambon berada pada posisi 4 dari 5 Satker yang ada. Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

- Memiliki SOP terkait Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Bppp Ambon (Nilai)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan/Arsiparis: Adanya tenaga kearsipan yang kompeten dan berpendidikan khusus (minimal D3 Kearsipan) sangat penting untuk pengelolaan yang sistematis.
- Sarana dan Prasarana Kearsipan: Penyediaan fasilitas fisik yang memadai, seperti lemari besi/loker khusus, gudang arsip yang luas, serta ruang penyimpanan yang aman dari kerusakan (tahan api/lembab).
- Digitalisasi dan Teknologi Informasi: Penerapan sistem kearsipan berbasis digital (e-arsip) membantu mengurangi penumpukan arsip fisik, menjaga keamanan data, serta mempercepat akses informasi. Ini termasuk penggunaan komputer, pemindai (scanner), dan jaringan internet/WiFi yang memadai.
- Prosedur Pengelolaan Arsip (SOP): Penerapan prosedur yang standar dalam penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip agar tertib administrasi

- **IKSK.02.07 Indikator Kinerja Jumlah Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) satker BPPP Ambon (Nilai)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualias pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi : Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Dapat Ditransfer/Direplikasi dan Berkelanjutan

Sampai akhir Triwulan III tahun 2026, capaian indikator ini belum terisi (nol) karena evaluasi IKU dilakukan secara tahunan. Beberapa Faktor Penunjang Kinerja Jumlah Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) antara lain :

1. Komitmen pimpinan dan pegawai, yaitu adanya dukungan pimpinan serta keterlibatan seluruh pegawai dalam mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Identifikasi kebutuhan dan permasalahan pelayanan, yaitu kemampuan mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan pelatihan kelautan dan perikanan yang membutuhkan solusi inovatif.
3. Kreativitas dan ide inovasi, yaitu munculnya gagasan baru yang efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Koordinasi dan kerja sama antarpegawai, yaitu kolaborasi antarbagian dalam menyusun, mengembangkan, dan menyempurnakan proposal inovasi pelayanan publik.
5. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pelayanan, meningkatkan akses informasi, serta mempercepat penyelesaian layanan kepada masyarakat.
6. Ketersediaan data dan dokumentasi pendukung, yaitu tersedianya data permasalahan, kondisi sebelum dan sesudah inovasi, serta bukti pendukung yang diperlukan dalam penyusunan proposal IPP.
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yaitu peningkatan pemahaman pegawai mengenai penyusunan proposal inovasi pelayanan publik melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan.
8. Monitoring dan evaluasi, yaitu pelaksanaan pemantauan serta evaluasi secara berkala untuk memastikan inovasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

- **IKSK.02.08 Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik) satker BPPP Ambon (Nilai)**

Nilai keterbukaan informasi publik dinilai melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian Keterbukaan Informasi Publik, yang dihitung berdasarkan akumulasi 5 (lima) aspek, antara lain:

- Mengumumkan Informasi Publik (15),
- Menyediakan Dokumen Informasi (25),
- Sarana Prasarana (25),
- Kelembagaan (25) ,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- dan Digitalisasi (10).

Kategori nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai 90– 100 : Informatif

Nilai 80– 89,9 : Menuju Informatif

Nilai 60– 79,9 : Cukup Informatif

Nilai 40– 59,9 : Kurang Informatif Kurang

39,9 : Tidak Informatif

Sampai akhir Triwulan III tahun 2026, capaian indikator ini belum terisi (nol) karena evaluasi IKU dilakukan secara tahunan, dengan beberapa faktor Penunjang antara lain :

1. Komitmen pimpinan dan pegawai, yaitu dukungan pimpinan serta keterlibatan pegawai dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2. Ketersediaan informasi publik, yaitu tersedianya informasi mengenai program kerja, kegiatan pelatihan, laporan kinerja, layanan publik, serta informasi lain yang wajib disediakan dan diumumkan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Optimalisasi pengelolaan website dan media informasi, yaitu pemanfaatan website resmi dan media sosial BPPP Ambon untuk menyampaikan informasi yang akurat, terkini, mudah diakses, dan mudah dipahami masyarakat.
4. Penguatan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu pelaksanaan tugas pengelolaan, pendokumentasian, penyimpanan, dan pelayanan permohonan informasi publik secara tertib dan sesuai prosedur.
5. Peningkatan kualitas pelayanan informasi, yaitu pemberian layanan informasi yang cepat, tepat, mudah, dan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan keterbukaan informasi publik.
6. Kelengkapan dokumen dan data pendukung, yaitu tersedianya daftar informasi publik, standar operasional prosedur pelayanan informasi, laporan pelayanan informasi, serta dokumentasi pendukung lainnya
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yaitu peningkatan pemahaman dan kemampuan pegawai dalam pengelolaan informasi publik melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi terkait keterbukaan informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Monitoring dan evaluasi secara berkala, yaitu pelaksanaan pemantauan terhadap kelengkapan informasi, kecepatan pelayanan, pemutakhiran data, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi keterbukaan informasi publik.

- **IKSK.02.09 Indikator Kinerja Pelayanan Publik Lingkup satker BPPP Ambon (Nilai)**

Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP Adalah perolehan hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan menindaklanjuti edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar hasil pengukuran dan pelaksanaan pemantauan dan evauasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri.

Aspek Penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah :

1. Kebijaksanaan Pelayanan (24%);
2. Profesionalisme (25%);
3. Sarana Prasarana (18% Inovasi (12%)
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%)
5. Konsultasi Pengaduan (11%)
6. Inovasi (12 %)

Indikator capaian indeks pelayanan publik KKP didapatkan dari Kementerian PAN dan RB sesuai kebijakan yang berlaku pada tahun penilaian. Instrumen yang digunakan, yaitu: IPP = Nilai F02 + Nilai F03

Keterangan: IPP = Indeks Pelayanan Publik Nilai

F02 = Formulir kuesioner observasi yang diisi oleh Evalutor, bobot 75%.

Nilai F03 = Formulir kuesioner survei publik yang diisi oleh pengguna layanan,

Sampai akhir Triwulan III tahun 2026, capaian indikator ini belum terisi (nol) karena evaluasi IKU dilakukan secara tahunan, dengan beberapa faktor Penunjang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

antara lain :

1. Komitmen pimpinan dan pegawai, yaitu dukungan pimpinan serta keterlibatan seluruh pegawai dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Penerapan standar pelayanan publik, yaitu tersedianya dan diterapkannya standar pelayanan yang jelas, meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif apabila ada, serta mekanisme pengaduan pelayanan.
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yaitu peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan yang ramah, cepat, tepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu penggunaan website, media sosial, dan sarana komunikasi digital untuk mempermudah akses informasi, pendaftaran pelatihan, serta penyampaian layanan kepada masyarakat.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, yaitu tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai, nyaman, aman, mudah diakses, serta mendukung kebutuhan pengguna layanan, termasuk kelompok rentan.
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat, yaitu tersedianya mekanisme penerimaan, pencatatan, tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.
7. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, yaitu pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan secara berkala untuk mengetahui kualitas pelayanan serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan.
8. Koordinasi dan sinergi antarunit kerja, yaitu kerja sama dalam pelaksanaan pelayanan, penyediaan informasi, dan penyelesaian permasalahan guna memastikan pelayanan berjalan secara efektif dan efisien.
9. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik, yaitu pemantauan berkala terhadap pelaksanaan standar pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur, pencapaian target kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi.

- **IKSK.02.07 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai)**

  Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain ; (a) Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95; (b) Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95; (c) Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau (d) Kurang, apabila nilai IKPA >70.

Nilai IKPA adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Capaian indikator ini akan dilakukan ekmbali pada akhir tahun 2026, dengan beberapa faktor Penunjang antara lain :

1. Tersedianya Manual IKU tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai).
2. Tersedianya SOP terkait pengisioan aplikasi OM SPAN yang merupakan bagian dari Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon.
3. Pemahaman yang cukup baik dari satuan kerja Banyuwangi terhadap komponen dan indikator dari penilaian IKPA serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran.

- **IKSK.02.08. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)**

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2026 71,50 Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain: Sangat Baik, apabila NKPA > 90; Baik, apabila NKPA >80 – 90; Cukup, apabila NKPA >60 – 80; Kurang, apabila NKPA >50 – 60; Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

Proses penilaian IKU ini bersifat tahunan danakan diukur pada akhir tahun 2026 sehingga nilai pencapaiannya pada Triwulan III Tahun 2026 masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Manual IKU tentang Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai).
2. SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SMART DJA oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.
3. pemahaman yang cukup baik dari satuan kerja terhadap komponen dan indikator dari penilaian NKPA serta disiplin dalam pelaksanaan penganggaran.

Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.03.01 Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)**

Peningkatan kelas Kelompok merupakan indikasi bahwa keberfungsian kelompok telah mampu memfasilitasi anggotanya dalam meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14 Tahun 2012 bahwa penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan merujuk kepada lima tolak ukur, yaitu : perencenaan, kemampuan berorganisasi, akses kelembagaan, kemampuan wirausaha, dan kemandirian, dan perhitungannnya dilakukan setiap triwulan.

Tabel 21. Capaian Kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang ditingkatkan kelasnya oleh BPPP Ambon

IKSK.03.01 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)		
Realisasi Triwulan III Tahun	Triwulan III Tahun 2026	Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2022	2023	2024	2025	2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
37	42	70	20	80	97	120	385	132	73.48

Capaian IKU ini pada Triwulan III 2026 sebesar 97 kelompok (120% dari target 80 kelompok). Realisasi ini mengalami kenaikan 385% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 74.48 % terhadap target Renstra 2029.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Perbandingan realisasi Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satker BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (Kelompok)	Realsiasi (Kelompok)	% Capaian
1	BPPP Ambon	80	97	120,00
2	BPPP Banyuwangi	55	66	120,00
3	BPPP Medan	20	24	120,00
4	BPPP Bitung	10	12	120,00

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 1 diantara 4 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

1. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
2. Adanya Manual IKU tentang peningkatan kelas kelompok.
3. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kepada kelompok pelaku utama/usaha sektor KP telah terlaksana dengan baik sesuai target tahun 2026, dimana Kelompok yang sudah dibentuk oleh Penyuluh kemudian dilakukan pengukungan dengan menerbitkan Berita Acara dan SK Pengukuhan yang ditandatangai oleh Pejabat wilayah setempat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan III Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Penyuluh melakukan pendampingan kelompok dan telah mengidentifikasi dan melakukan peningkatan kelas kelompok terhadap calon kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui pendampingan yang dilakukan.
3. Koordinasi secara rutin dengan Dinas Perikanan setempat terkait proses peningkatan kelas kelompok.
4. Surat Keputusan dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah telah ditetapkan.

- **IKSK.03.02 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Ambon (kelompok)**

Kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Ambon (kelompok) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah pelaku utama/usaha bidang KP yang didampingi dan dibina oleh penyuluh perikanan. IKU ini diukur dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menghitung jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan di Satminkal BPPP Ambon. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

Tabel 23. Capaian Jumlah kelompok pelaku utama /pelaku pendukung yang disuluh oleh BPPP Ambon

IKSK.03.02 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
2400	2038	2835	2050	2200	2220	100.91	8.29	4.420	50.23

Capaian IKU ini pada Triwulan III 2026 sebesar 2220 kelompok (100,91% dari target 2200 kelompok). Realisasi ini mengalami kenaikan 8.29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 50,23 % terhadap target Renstra 2029.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Perbandingan realisasi jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	**Nama Satker**	**Target (Kelompok)**	**Realsiasi (Kelompok)**	**% Capaian**
1	BPPP Banyuwangi	2700	3240	120,00
2	BPPP Medan	2400	2900	120,00
3	BPPP Bitung	400	5000	120,00
4	BPPP Ambon	2200	2220	100,91

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 4 diantara 4 satker lainnya dikarenakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kelautan dan Perikanan, disamping kegiatan pendampingan kepada kelompok pelaku utama/usaha sektor KP dengan berbagai bentuk pengembangan seperti kegiatan berupa fasilitas proses pembelajaran, melalui pendekatan kelompok dengan cara memberikan penyuluhan secara langsung atau dengan membagikan liflet, brosur, dan lain-lain.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan III Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis, yaitu :

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.
2. Melaksanakan koordinasi antara penyuluh perikanan/penyuluh perikanan bantu untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok binaan serta memfasilitasi kelompok dalam mendapatkan akses permodalan, akses pasar, akses iptek dan meningkatkan PKS kelompok melalui sosialisasi baik peraturan atau teknologi informasi terkini dibidang perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- **IKSK.03.03 Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)**

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang ditumbuhkan dan dibentuk dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak Tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada Tahun 2017, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 25. Capaian Kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang dibentuk oleh BPPP Ambon.

IKSK.03.03 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan II Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
170	140	175	80	208	259	120	213	272	91.91

Capaian IKU ini, pada Triwulan III 2026 sebesar 250 kelompok (120% dari target 208 kelompok). Realisasi ini mengalami kenaikan 272% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 91.91 % terhadap target Renstra 2029.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Perbandingan realisasi Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Satker	Target (Kelompok)	Realsiasi (Kelompok)	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	200	260	120,00
2	BPPP Ambon	208	250	120,00
2	BPPP Medan	115	138	120,00
3	BPPP Bitung	30	40	120,00

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 2 diantara 4 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan III Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun 2026.

3. Kegia tan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya.

- **IKSK.03.04 Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)**

Merupakan indikator yang menunjukan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP no 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada Tahun 2025, cara perhitungannya adalah menjumlahkan Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan.

Tabel 27. Capaian Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)

IKSK.02.04 Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Ambon (Unit)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	46	22	23	120	-50	32	71.88

Capaian IKU ini, pada Triwulan III 2026 sebesar 23 unit (104,55 % dari target 22 unit). Realisasi ini mengalami penurunan – 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan telah berkontribusi sebesar 71.88% terhadap target Renstra 2029.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Perbandingan realisasi Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target (Unit)	Realsiasi (Unit)	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	33	40	120,00
2	BPPP Medan	16	20	120,00
3	BPPP Ambon	22	23	104,55
4	BPPP Bitung	10	12	120,00

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 3 diantara 4 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 Tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Triwulan III 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada Tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya.

- **IKSK.03.05 Media Penyuluhan terstandart yang disusun di BPPP Ambon (Paket)**

Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya.

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada Tahun 2025, cara perhitungannya adalah menghitung jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya.

Tabel 29. Capaian Indikator Media Penyuluhan Terstandart yang disusun di BPPP Ambon (Paket)

IKSK.03.05 Capaian Indikator Media Penyuluhan Terstandart yang disusun di BPPP Ambon (Paket)									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	1	1	2	120	0.81	32	246

Sampai akhir Triwulan III tahun 2026, Penyuluh Satminkal BPPP Ambon telah melakukan pendataan media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan dan mencapai 2 paket (120% dari target 1 paket).

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 30. Perbandingan realisasi Media Penyuluhan terstandart yang disusun di BPPP Ambon (Paket) oleh Satminkal BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	33	40	120,00
2	BPPP Medan	16	20	120,00
3	BPPP Ambon	1	2	120,00
4	BPPP Bitung	10	12	120,00

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 3 diantara 4 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh. Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 Tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Triwulan III 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada Tahun 2026.
3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya

- **IKSK.03.06 Penyuluh Perikanan Yang Lulus Kompetensi di BPPP Ambon**

Jumlah Penyuluh Perikanan dan/ atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAO KKP.

Formula Perhitungan : Menjumlahkan Penyuluh Perikanan dan / atau Asisten Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAOKKP.

Tabel 31. Capaian Indikator Penyuluh Perikanan Yang Lulus Kompetensi di BPPP Ambon (orang)

IKSK.03.06 Penyuluh Perikanan Yang Lulus Kompetensi di BPPP Ambon									
Realisasi Triwulan III Tahun				Triwulan III Tahun 2026				Rancangan Indikator BPPP Ambon 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target 2026	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0	0	0	1	1	1	100	-	20	5

Sampai akhir Triwulan III tahun 2026, Penyuluh Satminkal BPPP Ambon yang melakukan uji kompetensi sebanyak 1 orang (100% dari target 1 orang).

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Perbandingan Penyuluh Perikanan Yang Lulus Kompetensi di BPPP Ambon oleh Satminkal BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Banyuwangi	33	40	120,00
2	BPPP Medan	16	20	120,00
3	BPPP Ambon	1	1	100,00
4	BPPP Bitung	10	12	120,00

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 3 diantara 4 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh. Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 Tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Triwulan III 2026, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada Tahun 2024.
3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BPPP Ambon pada tanggal 31 september 2026, dapat dilihat pada tabel 33 berikut :

Tabel 33. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 September 2026

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
32.12	PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	66,055,168,000	48,173,989,339	72.93	17,881,178,661
032.12.DL	*Program Pendidikan dan Pelatihan Vakasi*	13,144,408,000	9,339,006,519	197	3,805,401,481
2375.RAL.711	Peralatan dan Mesin Pelatihan KP	11,000,000,000	7,919,945,290	72.00	3,080,054,710
2375.SCC.831	Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang dilatih	770,267,000	374,230,394	48.58	396,036,606
7020.QDD.646	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dan penyuluhan KP	1,374,141,000	1,044,830,835	76.04	329,310,165
032.12.WA	*Program Dukungan Manajemen*	52,910,760,000	38,834,982,820	73.40	14,075,777,180
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	52,910,760,000	38,834,982,820	73.40	14,075,777,180
2378.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	52,904,296,000	38,831,033,820	73.40	14,073,262,180
2378.EBA.962	Layanan Umum	13,218,000	10,481,615	-	2,736,385
2378.EBA.994	**Layanan perkantoran**	**52,891,078,000**	**38,820,552,205**	**73.40**	**14,070,525,795**
001	Gaji dan Tunjangan	50,483,170,000	36,995,949,830	73.28	13,487,220,170
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,407,908,000	1,824,602,375	75.78	583,305,625
2378.EBD	Layanan manajemen Kinerja Internal	6,464,000	3,949,000	61.09	2,515,000
2378.EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk satker vertikal	2,040,000	361,000	17.70	1,679,000
2378.EBD.Z27	Layanan Manajemen Keuangan untuk satker vertikal	4,424,000	3,588,000	81.10	836,000

Secara umum kinerja BPPP Ambon pada Triwulan III Tahun 2026 belum semua dilaksanakan dan capaian kinerja yang di hasil belum tercapai secara optimal. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Ambon disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

Tabel 34. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama sampai dengan tanggal 31 September 2026

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% REALISASI
1	Lulusan Pelatian KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Industri dan Dunia Usaha dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Orang)	1.320.000		
2	Jumlah presentase peserta pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang menerapkan kompetensi Hasil pelatihan di BPPP Ambon (%)	-		
3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	133.702.000	133.701.656	100.00
4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)	-		
5	Propsal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan	8.841.000	8.841.700	100.00
6	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	627.724.000	231.688.038	36.91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7	Sarana dan Prasaran Pelatihan KP yang ditingkakan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	11.000.000.000	7.919.945.290	72.00
8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetansi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)			
9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	2.402.308.000	1.189.517.375	51.39
10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	6.100.178.000	4.508.768.250	73.91
11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	720.000	361.000	50.13
12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	4.424.000	3.588.000	81.10
13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)			
14	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Internal BPPP Ambon			
15	Jumlah Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) satker BPPP Ambon (Nilai)	838.300.000	606.611.842	72.36
16	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPP Ambon (Nilai)			
17	Nilai Indeks Pelayanan Publik Lingkup satker BPPP Ambon	5.600.000	5.085.000	90.80
18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon	13.218.000	10.481.615	79.29
19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			
20	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	450.833.000	341.983.000	75.85
16	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	450.833.000	341.983.000	75.85
17	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	450.834.000	341.984.000	75.85
18	Gabungan Kelompok/Koperasi Kelurahan Merah Putih yang mendapatkan pendampingan oleh BPPP Ambon (Unit)	21.641.000	18.880.835	87.24
19	Media Penyuluhan Tersatandart yang disusun di BPPP Ambon (Paket)	34.688.176.000	25.450.905.582	73.37
20	Penyuluh Perikanan yang lulus peningkatan kompetansi (orang)	8.856.516.000	6.429.664.156	72.60
	Total	**66,055,168,000**	**48,173,989,339**	**72.93**

Sumber data : Aplikasi OmSpan Kemenkeu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.4. Efisiensi Anggaran BPPP Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Penghitungan efisiensi anggaran dapat dilihat pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Tabel 35. Nilai Efisiensi BPPP Ambon per masing-masing Indikator Kinerja Utama

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (%)	PAGU TOTAL	REALISASI	Persentase Realisasi Pagu Total (%)	Presentasi Efisiensi (%)
Terselenggara nya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Lulusan Pelatian KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Industri dan Dunia Usaha dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (Orang)	120	1.320.000	0	-	
	Jumlah presentase peserta pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang mendapatkan kompetensi Hasil pelatihan di BPPP Ambon (%)					
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	120	133.702.000	133.701.656	100.00	20
	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)		-			
	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan	120	8.841.000	8.841.700	100.00	20
	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	115,56	627.724.000	231.688.038	36.91	78,7
	Sarana dan Prasaran Pelatihan KP yang ditingkakan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)		11.000.000.000	7.919.945.290	72.00	
	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetansi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)					
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	105,81	2.402.308.000	1.189.517.375	51.39	54,4
	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)		6.100.178.000	4.508.768.250	73.91	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	103,27	720.000	361.000	50.13	53,14
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	116,28	4.424.000	3.588.000	81.10	35,18
	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	120				
	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Internal BPPP Ambon	120				
	Jumlah Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) satker BPPP Ambon (Nilai)	120	838.300.000	606.611.842	72.36	47,6
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BPPP Ambon (Nilai)					
	Nilai Indeks Pelayanan Publik Lingkup satker BPPP Ambon		5.600.000	5.085.000	90.80	
	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)		13.218.000	10.481.615	79.29	
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)					
Terselenggara nya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	120	450.833.000	341.983.000	75.85	44,2
	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	100,91	450.833.000	341.983.000	75.85	25,06
	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	120	450.834.000	341.984.000	75.85	44,2
	Gabungan Kelompok/Koperasii Kelurahan Merah Putih yang mendapatkan pendampingan oleh BPPP Ambon (Unit)	104,55	21.641.000	18.880.835	87.24	17,31
	Media Penyuluhan Tersatandar yang disusun di BPPP Ambon (Paket)	120	34.688.176.000	25.450.905.582	73.37	46,6
	Penyuluh Perikanan yang lulus peningkatan kompetansi (orang)	100	8.856.516.000	6.429.664.156	72.60	27,4
TOTAL		**112,8**	**66,055,168,000**	**48,173,989,339**	**72,93**	**34,87**

Sumber data : Aplikasi OmSpan Kemenkeu dan Aplikasi Kinerjaku KKP

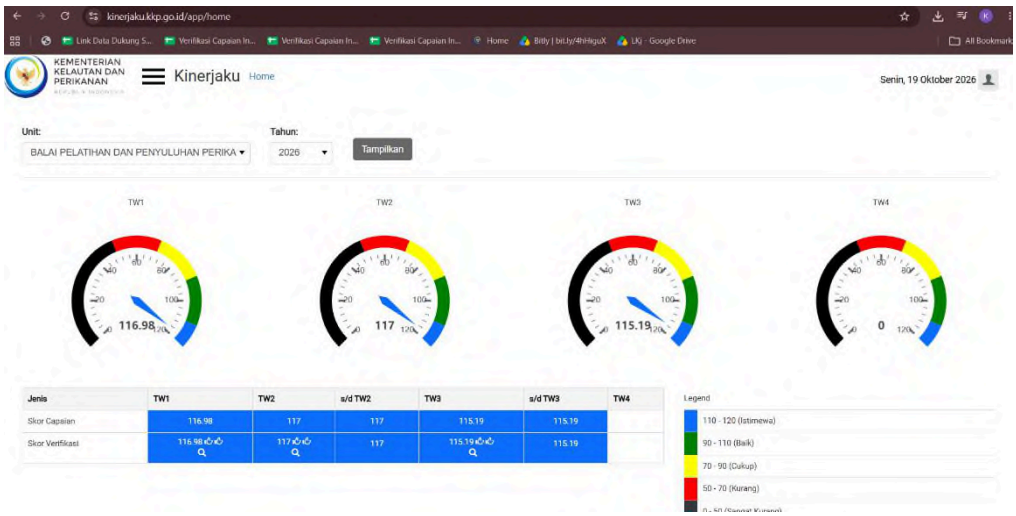
Efisiensi anggaran BPPP Ambon pada Triwulan III Tahun 2026 memperoleh skor 34,87 dan hal ini dikarenakan karena seluruh IKU telah terealisasi dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PENUTUP

3.1 Capaian Kinerja Utama

Pada Tahun 2026, BPPP Ambon memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key perfomance indikator*), disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *logical framework* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon Tahun Triwulan III 2026 sebesar **115.19 %,** sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku Level 4 BPPP Ambon

Selama Triwulan III tahun 2026, dari 16 IKU yang menjadi target Triwulan III tahun 2026 BPPP Ambon, telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian target dan realiasi dari 25 IKU tersebut adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 32. Capaian IKU BPPP Ambon Triwulan III Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	80	97	120
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Ambon yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)			
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	220	267	120
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan BPPP Ambon (dokumen)			
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Ambon (proposal)	1	2	120
		6	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0.45	0.52	115.56
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)			
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Ambon (Dokumen)			
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	70	74.07	105,87
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)			
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	81	83.65	103
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	86	100	116.28
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	77	100	120
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Ambon (Nilai)	71	88,50	120
		15	Jumlah usulan proposal Inovasi Pelayanan Publik (IPP) Satker BPPP Ambon (Nilai)	1	2	120
		16	Nilai keterbukaan Informasi Publik BPPP ambon (Nilai)			
		17	Nilai Indeks Pelayanan Publik lingkup satker BBB ambon (Nilai)			
		18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	20	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	80	97	120
		21	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	2200	2220	100,91
		22	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	208	250	120
		23	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkkan Pendampingan oleh BPPP Ambon (unit)	22	23	104,55
		24	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Ambon (Paket)	1	2	120
		25	Penyuluh Perikanan Yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Ambon (orang)	1	1	100

Sumber tabel : Aplikasi Kinerjaku KKP

3.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi Triwulan III tahun 2026, IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang diprediksi tidak tercapai target kinerjanya dikarenakan kurang termonitor setiap triwulannya. Maka dari itu Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B. 11/BPPP.AMB/OT.710/I/2026

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2026 dipandang perlu memberikan tugas kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 dan Triwulan Tahun 2026;
2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat tugas ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada BPPP Ambon;
3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA- 032.12.2.238755/2026, Jakarta, 01 Desember 2025.

Dasar :
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 06MEN-SJ/KP.430/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.41/MEN/KU.611/2020 Tanggal 30 September 2020 Tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar terlampir.

Untuk :
1. Sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2026 dan Triwulan BPPP Ambon Tahun 2026 (penugasan terlampir);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 2 Januari 2026
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon,

Ditandatangani Secara Elektronik

Abubakar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat tugas
Nomor : B. 11/BPPP.AMB/OT.710/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

I. Daftar nama Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) :

No.	Nama/ Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.S 19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Penanggungjawab Pengumpulan Data / Ketua
2.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si 19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Penanggungjawab Pengumpulan Data
3.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si 19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analis Kepegawaian Muda	Penanggungjawab Pengumpulan Data
4.	Dessy Rompis, S.AP 19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Sekretaris
5.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si 19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
6.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom 199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Anggota

II. Daftar penugasan Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) :

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
1.	Penanggungjawab Pengumpulan Data / Ketua	Merencanakan,menyusun,memeriksa Lkj dan mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Program Dan Monev

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
ditandatangani secara elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
2.	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari subbagian Tata Usaha
3.	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Pelatihan
4.	Penanggungjawab Pengumpulan Data	Mengkoordinir pengumpulan data dukung dari Seksi Penyuluhan
5.	Sekretaris	Menyusun laporan kinerja (LKj)
6.	Anggota	Membantu menyusun laporan kinerja (LKj)

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon,

Ditandatangani Secara Elektronik

Abubakar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2026

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, perlu membentuk tim teknis tata kelola kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, perlu memberi penugasan kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;
3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA- 032.12.2.238755/2026, Jakarta, 01 Desember 2025.

Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang KementerianKelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Memberi Tugas

Kepada : Daftar terlampir.

Untuk :
1. Sebagai tim teknis tata kelola kinerja BPPP Ambon Tahun 2024 (daftar penugasan terlampir);
2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 2 Januari 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Abubakar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat tugas
Nomor : B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

I. Daftar Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon Tahun Anggaran 2026 :

Penanggung Jawab				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001 Pembina IV/a	Kepala Balai	Pengarah
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Penanggung Jawab Tata Kelola Kinerja Manajerial
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Pelatihan
4.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analis Kepegawaian Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Penyuluhan
5.	Rachel L. Wattimena, S.Pi.,M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Anggota
Tim Pelaksana Kesekretariatan				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Ketua
2.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
3.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
4.	La Tati	19680423 199203 1 001 Penata Muda Tk.I / IIIb	Pengadm. Persuratan	Pelaksana Sarpras dan PNBP/Manajer Kinerja
5.	Polly S.B Christian, S.St.Pi,M.Si	19770608 200312 1 004 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Pelaksana Pelatihan /Manajer Kinerja
6.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Pengemudi	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
Sub-Tim Perencanaan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Koordinator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penanggung Jawab				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
2.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Anggota
3.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analis Kepegawaian Muda	Anggota
Sub-Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Koordinator
2.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
3.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
4.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Pengemudi	Anggota
Sub-Tim Evaluasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Koordinator
2.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
3.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
4.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Anggota
5.	Johanna L. Thenu, S. Pi, MP	19770415 200502 2 001 Penata Tk.I III/d	WI Muda	Anggota
6.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
Sub-Tim Verifikasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Koordinator
2.	Murni Samin, S.Sos	19771020 200604 2 009 Penata Muda III/a	Pengelola Kepegawaian	Anggota
3.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota
4.	Soraya, S.Pi	198807062025212053 IX	Penata Layanan Operasional	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

II. Daftar Penugasan Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon Tahun Anggaran 2026 :

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
2.	Penaggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
3.	Pelaksana	▪ Ketua: Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon. ▪ Sekretaris: Memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon. ▪ Manajer Kinerja: Mengkoordinasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan ▪ Koordinator Sub-Tim: Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan Sub-Tim serta melaporkan hasil kepada Ketua Tim Pelaksana Kesekretariatan
4.	Sub-Tim	▪ Sub-Tim Perencanaan Kinerja 1) Memastian bahwa a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja telah tersusun memuat : 1. Visi, Misi, dan Program; 2. Tujuan yang berorientasi hasil, indicator kinerja tujuan, dan target; 3. Sasaran yang berorientasi hasil, indicator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta Indikator Kinerja Utama (IKU). b. Indikator Kinerja :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
		1. Digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indicator kinerja level III; 2. Indikator Kinerja eselon III telah selaras dengan IKU; 3. Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C;dan 4. Ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi. c. Dokumen kontrak kinerja memuat : 1. Perjanjian Kinerja (PK): i. Tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya; ii. Memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan;dan iii. Dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya. 2. Peta strategi; 3. Rincian target IKU secara bulanan / triwulanan / semesteran / tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; 4. Matriks cascading kinerja organisasi level III 5. Pohon kinerja level III 6. Inisiatif strategi/rencana aksi atas PK. 2) Memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan; 3) Memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja;dan 4) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing Sub-Tim Pengukuran Kinerja 1) Menyusun pedoman / mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja; 2) Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
		3) Memastikan seluruh ahsil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja;dan 4) Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi amsing-masing. - Sub-Tim Pelaporan Kinerja 1) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/semesterab/tahunan). 2) Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3) Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan; 4) Memastikan LKj yang disusun dismapikan tepat waktu dan di unggah ke dalam website resmi;dan 5) Mengkoodinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. - Sub-Tim Evaluasi Kinerja 1) Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja; 2) Menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya; 3) Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan; 4) Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan;dan 5) Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit ogranisasi masing-masing. - Sub-Tim Verifikasi Kinerja 1) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja; 2) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja; 3) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
		4) Memastikan seluruh softcopy data, informasi, dan dokumen hasil perencanaa, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi online;dan 5) Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Abubakar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233
TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2026

Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2026 dipandang perlu menunjuk Tim Tata Kelola SAKIP di BPPP Ambon;
2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat tugas ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai Tim Tata Kelola SAKIP pada BPPP Ambon;
3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA- 032.12.2.238755/2026, Jakarta, 01 Desember 2025.

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan atta cara review atas laporan kinerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar nama terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk : 1. Sebagai Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2026 BPPP Ambon dengan tugas sebagai berikut :

1) Ketua
mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan verifikasi kinerja organisasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2) Sekretaris
membantu Ketua dalam mengoordinasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan verifikasi kinerja organisasi di lingkungan BPPP Ambon; dan
memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Pengelolaan Kinerja BPPP Ambon

3) Manajer Kinerja
mengoordinasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan verifikasi kinerja organisasi di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan.

4) Sub Tim Perencana Kinerja
   a. menyusun indikator kinerja organisasi yang digunakan sebagai ukuran kinerja organisasi secara formal, baik indikator kinerja level Imaupun level II
   b. memastikan bahwa dokumen perencanaan kinerja organisasi memuat:
      a) perjanjian kinerja:
      b) rincian target indikator kinerja utama secara
      c) bulan/triwulan/semester/tahun yang
      d) memuat metode perhitungan masing-masing
      e) indikator kinerja utama;
      f) matriks cascading kinerja organisasi level I
      g) sampai dengan level II;
      h) pohon kinerja level I sampai dengan level II;
      i) dan
      j) rencana aksi atas perjanjian kinerja.
   c. menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja organisasi yang telah ditetapkan dan memastikan perubahan rencana aksi jika perjanjian kinerja organisasi mengalami perubahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d. memastikan seluruh sasaran, indikator kinerja, dan target diunggah kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja;
e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja organisasi secara berjenjang pada masing-masing unit organisasi eselon II; dan
f. mereviu dokumen rencana strategis dan rencana kinerja tahunan/rencana kerja yang paling sedikit memuat:
   a) visi, misi, dan program;
   b) tujuan yang berorientasi hasil, indikator
g. kinerja, tujuan, dan target; dansasaran yang berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan

5) Sub-Tim Pengukuran dan Verifikasi Kinerja
   a. Menyusun mekanisme pengukuran dan verifikasi capaian kinerja organisasi;
   b. Melaksanakan pengukuran dan verifikasi capaian indikator kinerja utama dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/ semesteran/tahunan);
   c. Memastikan seluruh hasil pengukuran dan verifikasi capaian indikator kinerja utama dan rencana aksi diunggah kedalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja; dan
   d. Mengordinasikan proses pengukuran dan verifikasi pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.
6) Sub-Tim Pelaporan Kinerja
   a. Menyusun mekanisme penyusunan Laporan Kinerja (LKj) organisasi;
   b. Menyusun dan mengordinasikan penyusunan LKj secara berkala (bulanan/triwulan/semester/tahunan);
   c. Memastikan LKj organisasi yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan serta disusun sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada PERMENKP No. 35 tahun 2023;
   d. Memastikan LKj organisasi yang disusun disampaikan tepat waktu dan diunggah ke dalam website resmi; dan Mengordinasikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 2 Januari 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat tugas
Nomor : B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

Daftar Nama Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2026:

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1	2	3	4	5
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001 Pembina Tk.I IV/b	Kepala Balai	Ketua
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Kasubag Umum	Sektetaris
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Manajer Kinerja
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Sub-Tim Perencanaan Kinerja
5.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	199411122025211049 IX	Penata Layanan Operasional	Sub-Tim Pengukuran dan Verifikasi Kinerja
6.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Pengemudi	Sub-Tim Pelaporan Kinerja

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Abubakar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara